

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) penyelenggaraan kesehatan menjadi berjenjang yaitu mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat kedua dan fasilitas kesehatan tingkat ketiga sehingga fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi tujuan pertama pasien ketika sakit <sup>(1)</sup>.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan kesehatan di wilayah kerja tertentu <sup>(2)</sup>.

Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelaksanaan laboratorium di Puskesmas harus menjamin hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan *Quality Control (QC)* atau pengendalian mutu.

Pengendalian Mutu (*Quality Assurance*) merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium <sup>(7)</sup>. Sedangkan Proses QC adalah salah satu kegiatan Pengendalian Mutu Internal yang merupakan suatu rangkaian pemeriksaan analitik yang ditujukan untuk menilai data analitik <sup>(2)</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Bab VIII (8.1.7) menjelaskan bahwa laboratorium harus melakukan, menindaklanjuti dan mendokumentasikan pengendalian mutu untuk setiap pemeriksaan laboratorium <sup>(3)</sup>.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan Rifaskes (Riset Fasilitas Kesehatan) di 9.831 Puskesmas yang ada di seluruh Indonesia yang merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI. Dari data hasil Rifaskes nasional 69,3 % petugas laboratorium puskesmas adalah tenaga analis kesehatan dan untuk tingkat Jawa Barat sebesar 65,9 % dari 1.069 Puskesmas, sedangkan rerata ketersediaan alat kesehatan (sarana dan prasarana) laboratorium Puskesmas secara nasional adalah 46,12% dan untuk tingkat Jawa Barat 43,79% <sup>(4)</sup>.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Satrio Wicaksono pada tahun 2019 disebutkan bahwa dari 30 laboratorium yang ada di wilayah Kota Bandung hanya 9 laboratorium (28%) yang sudah melakukan QC dan mengolah data tersebut dengan baik <sup>(5)</sup>. Dengan demikian penelitian sejenis ini penting untuk diteliti karena sejauh ini belum adanya pengukuran dan pelaporan data secara terukur tentang pelaksanaan QC di Kabupaten Garut.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dari 67 Puskesmas yang ada, 97% sudah terakreditasi dan tersebar di 42 Kecamatan, terdiri dari 32 Puskesmas DTP dan 35 Puskesmas Non DTP. Pada Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Kabupaten Garut Tahun 2019, salah satu komponen

yang masuk ke dalam penilaian adalah tentang Pengendalian Mutu Internal (PMI) laboratorium salah satunya adalah pelaksanaan QC. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum semua laboratorium Puskesmas melakukan QC, banyak faktor yang berhubungan belum terlaksananya QC ini.

Hasil observasi pendahuluan dari 10 laboratorium di Puskesmas Kabupaten Garut, terdapat 3 laboratorium yang sudah melaksanakan QC. Sementara 7 laboratorium yang belum melaksanakan QC dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai. Berdasarkan Permenkes No. 37 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas menyebutkan bahwa setiap laboratorium Puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu <sup>(2)</sup>.

Berdasarkan data dan observasi awal yang dilakukan peneliti, maka dari itu peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan QC.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan QC di Laboratorium Puskesmas Kabupaten Garut?
2. Bagaimana hubungan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), prosedur, kebijakan manajemen, sarana dan prasarana dengan pelaksanaan QC di laboratorium UPT Puskesmas di Kabupaten Garut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan QC di Laboratorium Puskesmas Kabupaten Garut.

#### **2. Tujuan Khusus**

Mengetahui hubungan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), prosedur, kebijakan manajemen, sarana dan prasarana dengan pelaksanaan QC di Laboratorium Puskesmas Kabupaten Garut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi laboratorium, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

#### **1. Bagi Laboratorium Puskesmas**

Sebagai bahan masukan bagi pihak laboratorium tentang desain pelaksanaan QC serta sebagai referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu manajemen laboratorium.

#### **2. Bagi Puskesmas**

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan QC.

#### **3. Bagi Dinas Kesehatan**

Menjadi *data base* pelaksanaan QC di Puskesmas Kabupaten Garut dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk membuat serta menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan QC.

